



# Laporan Kinerja **KPKNL** **Yogyakarta** **2023**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
Peran Strategis .....	5
Sistematika Laporan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
Rencana Strategis .....	7
Perjanjian Kinerja .....	10
Evaluasi Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
Capaian Kinerja Organisasi .....	16
Kinerja Lainnya .....	37
Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40
<b>LAMPIRAN</b>	

**PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta pada tahun 2023 serta penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik.



Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2023, KPKNL Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2023 dengan target kontrak kinerja tahun 2023, serta pencapaian beberapa kinerja lainnya.

Semoga Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta ini dapat memberikan gambaran atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dihadapi selama tahun 2023 dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan serta menjadi pendorong peningkatan kinerja KPKNL Yogyakarta.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pejabat dan staf KPKNL Yogyakarta yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.

Kepala KPKNL Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Jati Wiryawan



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Yogyakarta, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2023.

Visi KPKNL Yogyakarta selaras dengan visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai lima misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan metodologi *balanced score card* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari sebelas sasaran strategi. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
3. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif.
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.
9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif, dan
10. Organisasi yang Fit for Purpose.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria IKU didasarkan pada criteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2022 ini terdapat 19 (Sembilan belas) IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Yogyakarta dengan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 sudah sesuai target yang ditetapkan. Keseluruhan IKU KPKNL Yogyakarta yang terdiri dari 19 IKU berstatus hijau dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 115,72%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU dan *Matriks Cascading*.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih di bawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait terus dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU yang memiliki eksternalitas yang tinggi. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya menitikberatkan pada hasil capaian semata, tetapi turut memperhatikan kualitas IKU tersebut. Penyelarasan kontrak kinerja dengan Rencana Strategis DJKN tahun 2020-2024, dokumen rencana kerja, dan RKAKL serta pengelolaan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta sehingga mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif terhadap kebutuhan *stakeholder* dan pimpinan serta tentunya tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Yogyakarta dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

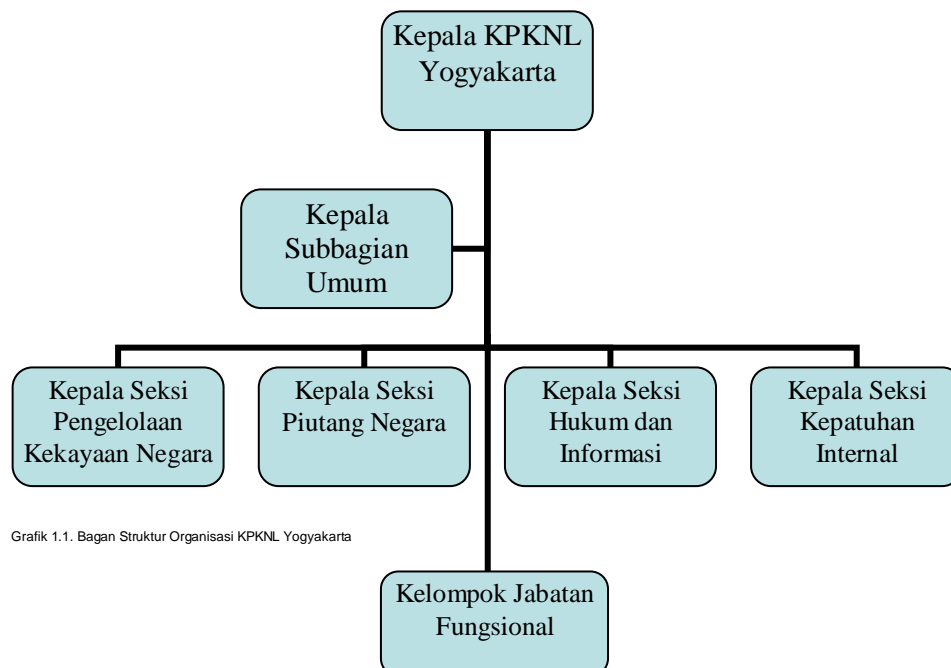
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara,

penilaian, dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Adapun wilayah kerja KPKNL Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

KPKNL Yogyakarta untuk tahun anggaran 2023 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Grafik 1.1. Bagan Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta

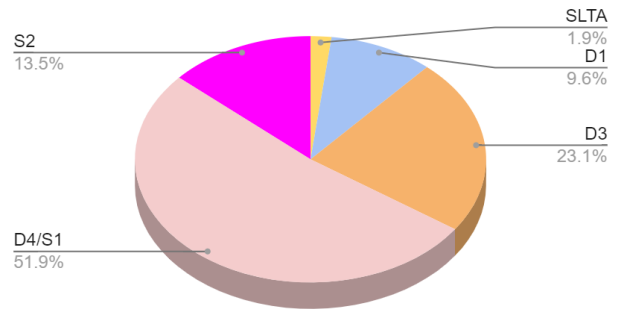
Adapun tugas masing-masing seksi/subbagian di atas adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Yogyakarta didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur berdasarkan data per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

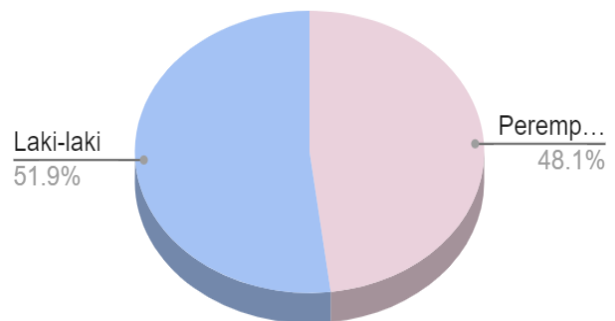
Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	1
D1	5
D3	12
D4/S1	27
S2	7
<b>Total</b>	<b>52</b>



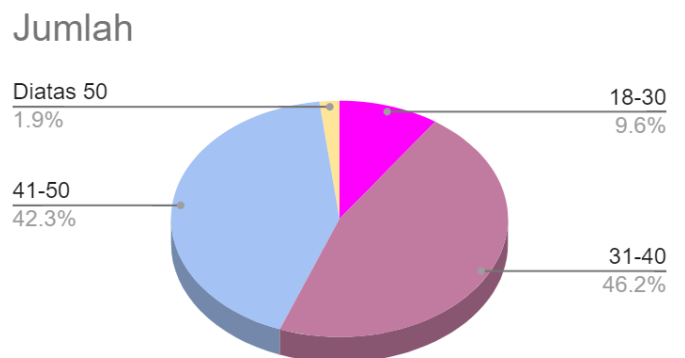
Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	25
Laki-laki	27
<b>Total</b>	<b>52</b>



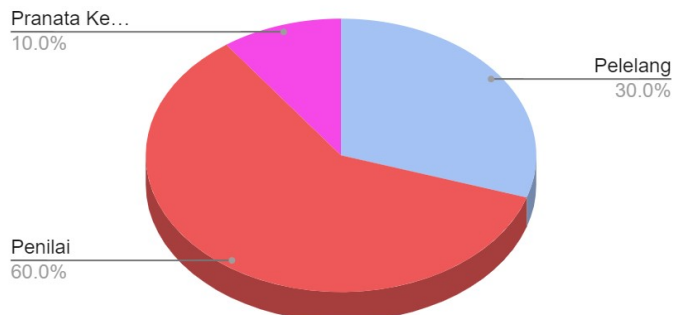
Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	5
31-40	24
41-50	22
Diatas 50	1
<b>Total</b>	<b>52</b>



Tabel 1.4  
Tenaga Fungsional KPKNL YOGYAKARTA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
Pelelang	3
Penilai	6
Pranata Keuangan APBN	1
<b>Total</b>	<b>10</b>



### Peran Strategis

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani dengan peran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBPN dari pengelolaan BMN, Piutang, dan Lelang, melakukan evaluasi kinerja BMN, serta mewujudkan implementasi layanan berbasis digital.
2. Mewujudkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mewujudkan penguatan sistem anti korupsi melalui birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
5. Mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

## Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sarana yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif.

### 2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan.

### 3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

### 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

### 5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Yogyakarta merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan berupa penetapan kebijakan dan penyusunan program.

Dokumen Rencana Strategis KPKNL Yogyakarta menjadi pedoman bagi KPKNL Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja. KPKNL Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan di pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Yogyakarta untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, strategi KPKNL Yogyakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Pengelolaan aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta turut berkontribusi dan berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan PNBPN dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBPN lelang dan PNBPN pengurusan piutang.
- b. Penggunaan BMN sesuai standar SBSK.
- c. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*).
- d. Pemutakhiran data piutang negara.
- e. Optimalisasi pengurusan piutang negara.
- f. Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan (Portofolio Aset Negara).

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah Pengelolaan lelang yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengukuran deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah: organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah serta komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah :

- a. Pemenuhan unit kerja dengan kriteria ZI menuju WBK/WBBM
- b. Mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service Kekayaan Negara*
- b. Mewujudkan basis data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di KPKNL Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola kehumasan pada KPKNL Yogyakarta.

**Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Yogyakarta harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Yogyakarta. Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Yogyakarta 2023 memuat 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, (3) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif, (4) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal, (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, (7) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif, (8) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal, (9) Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif, dan (10) Organisasi yang Fit for Purpose. Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tersaji dalam gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Yogyakarta



Peta Strategi KPKNL Yogyakarta menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Yogyakarta mencapai 10 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Keterkaitan antara sasaran strategi dan IKU dapat disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	80
1c-CP	Indeks Integritas	%	88,67

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

<b>Sasaran Strategis 3</b>			
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
3a-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	%	86

**Sasaran Strategis 4**  
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	68
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	%	100
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100

**Sasaran Strategis 5**  
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
5a-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Indeks	70

**Sasaran Strategis 6**  
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
6a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100
6b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	%	94
6c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	%	86

**Sasaran Strategis 7**  
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100

**Sasaran Strategis 8**  
Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	%	100
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

**Sasaran Strategis 9**

Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
9a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	80
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	indeks	60

**Sasaran Strategis 10**Organisasi yang *Fit For Purpose*

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
10a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK	Indeks	100

**Evaluasi Kinerja**

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2023, KPKNL Yogyakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Polarisas IKU *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah /kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. Target IKU menantang namun tetap realistis, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Target**

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

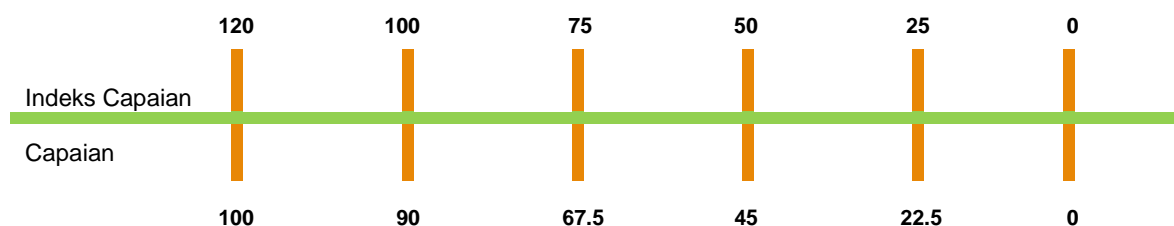
$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*.

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik:



$I_n$  = Indeks capaian

$I_{n-1}$  = Indeks capaian di bawahnya

$I_{n+1}$  = Indeks capaian di atasnya

$C_a$  = Capaian awal

$C_a$  = Realisasi/target x100%

$C_n$  = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana cara maksimum adalah } 200\%$$

b. Apabila Realisasi < Target , maka :

$$C_n = C_a$$

$C_{n-1}$  = Capaian di bawahnya

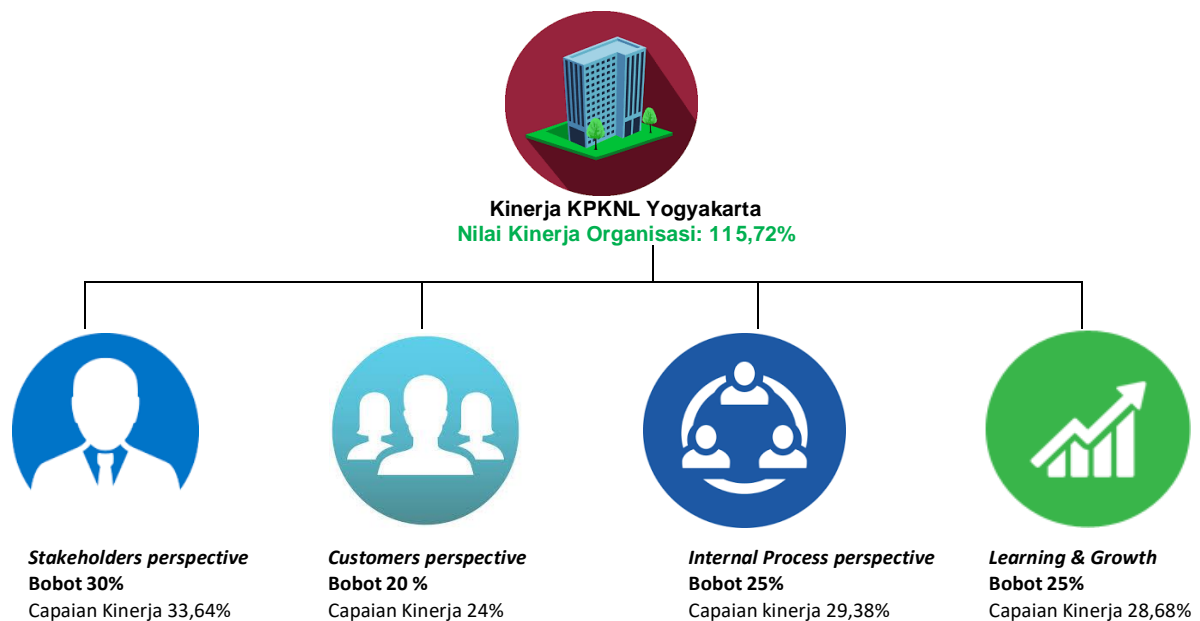
$C_{n+1}$  = Capaian di atasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta adalah sebesar **115,72**. Semua capaian IKU KPKNL Yogyakarta berstatus hijau yang berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi tiga IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp23,010 M)	134,20% Rp25,09 M	134,20%
2	Persentase produktivitas lelang	80%	105%	131,25%
3	Indeks Integritas	88,67	89,17%	100,56%

#### a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL berasal dari:

##### a. PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

##### b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

##### c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) Bea lelang,
- b) Bea lelang pegadaian,
- c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) Biaya permohonan lelang,
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima KPKNL Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar Rp30.879.744.899,00, terdiri dari:

##### a. PNBP pengelolaan BMN sebesar Rp20.469.559.505,00

- b. PNBP pelaksanaan lelang sebesar Rp10.390.809.431,00
- c. PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp19.375.963,00

Kendala yang dihadapi:

Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang telah melebihi target baik dari PNBP pengelolaan BMN, PNBP pelaksanaan Lelang maupun PNBP pengurusan piutang negara. Capaian ini perlu dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya dengan memperhatikan kendala-kendala yang pernah dihadapi yaitu:

1. Potensi pemanfaatan pada satker masih cukup besar tetapi belum tergali secara optimal (persetujuan pemanfaatan sudah terbit tapi belum ditindaklanjuti/belum terbit perjanjian dan potensi KSP banyak tapi belum diajukan)
2. PNBP yang masuk selama ini lebih besar dari pemindahtanganan, sementara pemanfaatan hanya dari sewa kantin, ATM yang nilainya relatif kecil.
3. Tingginya Lelang yang TAP disebabkan nilai limit lelang HT terlalu tinggi, objek lelang masih berpenghuni sehingga berpotensi risiko pasca lelang. (sama)
4. Terjadinya lelang wanprestasi menghilangkan potensi pencapaian bea lelang. (sama)

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Menghimpun data PNBP yang disetorkan oleh bendahara penerimaan.
2. Menghimpun data penerimaan PNBP dari KPPN.
3. Menghimbau satker agar mengoptimalkan asetnya melalui pemanfaatan BMN.
4. Penagihan Piutang Negara.
5. Sosialisasi *crash program* Piutang Negara.
6. Melakukan penggalan potensi lelang.
7. Melakukan penagihan langsung dan penyampaian Surat Paksa.
8. Memproses BKPN penyerahan baru sampai dengan tahap panggilan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan edukasi dan komunikasi secara digital
2. Meningkatkan penggalan potensi Lelang dengan dasar data permohonan lelang yang diajukan oleh stakeholder
3. Meningkatkan publikasi lelang.go.id

Berikut perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2020 s.d. 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	85.98%	100%	111.15%	100%	177.72%	100%	134,20%
18.12 M	15.57 M	15.76 M	17.52	15.24 M	27.09 M	23,01 M	30,89 M

### b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang laku yang terdiri dari lot laku lelang per Jenis Lelang dan frekuensi lelang. Setiap Jenis Lelang memiliki target persentase yang berbeda yaitu 75% untuk Lelang non eksekusi, 55% untuk Lelang noneksekusi wajib, 5% untuk Lelang eksekusi Hak Tanggungan dan 25% untuk Lelang eksekusi selain Hak Tanggungan. Pembobotan untuk Lot laku lelang per Jenis Lelang yaitu 40% dan realisasi frekuensi lelang yaitu 60% dan capaian maksimal untuk masing-masing pembobotan yaitu sebesar 105%. Tahun 2023, target produktivitas lelang pada KPKNL Yogyakarta adalah 80% dari jumlah lot laku lelang per Jenis Lelang dan realisasi frekuensi lelang.

Capaian produktivitas tahun 2023 adalah sebesar 105% dengan jumlah Lot Laku Lelang sebesar 3.846 dari total lot Lelang sebesar 9.053 dan realisasi frekuensi Lelang sebesar 978 dari target 791 frekuensi lelang, sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Capaian IKU Produktifitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Produktifitas lelang :	80%	105%	131,25%
Jumlah Jumlah Lot Laku Lelang		3.846	
Jumlah frekuensi lelang		978	

Penerapan layanan permohonan *online* dan *e-Auction* di era digital saat ini memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat terlebih pasar properti pasca pandemi kembali menggeliat. Hal ini dapat mendorong hasil lelang di Tahun 2023 menjadi optimal.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU KPKNL Yogyakarta Penggalan potensi lelang dan berkoordinasi dengan *stakeholder* agar mengajukan lelang prioritas laku dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah beberapa instansi dan para pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan permohonan lelang BMD dan Lelang sukarela UMKM.

*Action plan* selanjutnya akan terus mengoptimalkan koordinasi pengguna jasa lelang terkait penggalian potensi lelang.

### c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Responden pada penilaian integritas terdiri dari Internal yang berasal dari Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada KPKNL Yogyakarta dan Eksternal yang berasal dari Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan komponen dari masing-masing sumber yaitu :

#### Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

#### Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai.

Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 89,17 dari target 88,67 sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4. Capaian IKU Indeks Integritas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna

jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Lelang	100% Rp205.000.000.000	156,09% Rp319.985.746.767	156,09%
2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% Rp3.000.000.000	168,10% Rp5.042.996.827	168,10%

#### a. Persentase Hasil Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan lelang pegadaian dalam periode tertentu.

Adapun realisasi pokok lelang s.d. triwulan IV 2023 sebesar Rp319.985.746.767,- dari target tahunan Rp205.000.000.000,- (156,09%).

Prospek bisnis properti yang kembali meningkat pasca pandemi berdampak signifikan pada capaian kinerja Lelang yang pada tahun ini tercapai dengan optimal.

Capaian IKU Persentase hasil lelang ditabulasikan dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKU persentase pokok lelang

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pokok Lelang PL I	116.000.000.000	226.093.073.167	156,09%
2.	Pokok Lelang Pegadaian	89.000.000.000	93.892.673.600	
	Total	205.000.000.000	319.985.746.767	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi pokok lelang:

Tabel 3.7 Perbandingan target dan realisasi Pokok lelang tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pokok lelang PL I	100% Rp87.000.000.000	87,74% Rp76.330.174.679	100% Rp116.000.000.000	194,91% Rp226.093.073.167
Pokok Lelang Pegadaian	100% Rp93.000.000.000	99,01% Rp92.080.618.127	100% Rp89.000.000.000	105,50% Rp93.892.673.600
Total	100% Rp180.000.000.000	93,56% Rp168.410.792.806	100% Rp205.000.000.000	156,09% Rp319.985.746.767

KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target pokok lelang yang optimal melalui penggalian potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada *stakeholder* serta koordinasi dengan perum pegadaian. Kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai rencana aksi di tahun 2024.

#### b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang berasal dari :

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan,
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
- Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan,
- termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Dengan keterbatasan kondisi akibat dampak pandemi covid-19, pemerintah hadir memberikan stimulus dan dukungan pemulihan ekonomi nasional dengan meluncurkan program keringanan utang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi dengan Mekanisme Crash Program merupakan perwujudan dari amanah Undang-Undang No. 9 Tahun 2020.

KPKNL Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan program keringanan hutang sehingga percepatan penyelesaian outstanding piutang negara yang dikelola tahun 2023 dapat melampaui target.

Sampai dengan akhir tahun 2023 KPKNL Yogyakarta berhasil menyelesaikan outstanding piutang negara sebesar Rp5.042.996.827 (168,10%), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2022-2023

2022			2022		
Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Rp1,25 M	Rp3,29 M	263,71%	Rp3 M	Rp5.042 M	168,10%

### 3. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta yaitu 100% dari target sebesar 86% dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 67.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 67.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 sebanyak 67.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023 sebanyak 67.

#### 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian..

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara yang Optimal

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	68%	84,30%	123,97%
2	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100% 599	120,37% 721	120,37%
3	Persentase Penyelesaian BKPN	100% 260	120,38% 313	120,38%

##### a. Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

IKU ini menghitung penggunaan BMN yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset negara termasuk

*existing* luasan BMN satuan kerja. Target kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 68%. Adapun realisasi IKU sebesar 84,30% dengan nilai capaian sebesar 123,97%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan : (1) melakukan pengukuran atas kuantitas terlebih dahulu ; (2) Melakukan kunjungan lapangan, (3) Survei lapangan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan satker, melakukan penelitian lapangan, pendataan serta koordinasi yang lebih efektif dengan satker, seluruh data yang diperlukan dapat tersedia dengan lengkap dan tepat waktu sehingga seluruh *form* SBSK yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

#### **b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan**

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Pada tahun 2023, realisasi IKU ini adalah 643 bidang (126,57%) dari target 508 bidang (100%) sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2023:

Tabel 3.10. Perbandingan target dan realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020-2023

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% 93 bidang	111.83% 104 bidang	100% 551 bidang	100.54% 554 bidang	100% 508 bidang	126,57% 643 bidang	100% 599 bidang	120,37% 721 bidang

Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL mencapai target sertifikasi tahun 2023 adalah melalui rapat koordinasi sertifikasi (Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kanwil BPN, Kantor pertanahan, satker target Sertifikasi), melakukan indentifikasi, dan verifikasi serta *one on one meeting*.

*Action plan* berikutnya adalah akan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi untuk pelaksanaan IKU tahun 2024.

### c. Persentase Penyelesaian BKPN

Penyelesaian *outstanding* piutang negara dipercepat dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2023, realisasi IKU ini adalah sebesar 120,38% (313 BKPN) dari target 100% (260 BKPN) pada perjanjian kinerja KPKNL Yogyakarta.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023:

Tabel 3.11. Perbandingan target dan realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020-2023

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100,64%	100%	103,37%	100%	137,18%	100%	120,38%
1014	1020	919	950	156	214	260	313

*Action plan* berikutnya adalah memanggil debitur yang memenuhi syarat *Crash Program*, melaksanakan crash program, dan melaksanakan PSBDT.

## 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.12.

Tabel 3.12 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	95,75	136,79

## 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 3 IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% 48	125,36% 64	125,36%
2	Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction	94% 978	99,80% 976	106,17%
3	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	99,80%	116,04%

### a. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

Di tengah-tengah situasi pandemi covid-19, KPKNL Yogyakarta berhasil mencapai target portofolio aset yang ditetapkan tahun 2022 melalui upaya menghimbau satker menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BMN, melaksanakan penelitian lapangan, pengumpulan data, observasi dan wawancara.

Pada tahun 2023, realisasi IKU ini adalah evaluasi kinerja sebesar 35 NUP dengan realisasi sebanyak 36 NUP dan penyampaian rekomendasi sebesar 13 NUP dengan realisasi 28 NUP.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2021 s.d. 2023:

Tabel 3.14. Perbandingan target dan realisasi Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tahun 2020-2022

2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	120.08%	100%	122,54%	100%	125,36%
518 NUP	622 NUP	71	87	48	64

#### b. Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Target capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* adalah sebesar 94% dari realisasi frekuensi lelang.

Capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* tahun 2023 adalah sebesar 99,80% dari target 94%, artinya implementasi *e-Auction* pada KPKNL Yogyakarta berjalan baik dan lancar. Frekuensi lelang sampai dengan triwulan IV 2023 sebanyak 978 pelaksanaan lelang dengan 976 frekuensi *e-auction* dan *e-Conventional Auction* dan 2 frekuensi Lelang dengan Lelang konvensional pada pelaksanaan Lelang sukarela UMKM. Selanjutnya penerapan *e-auction* akan dijalankan dengan lebih optimal untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengakses lelang, sehingga diharapkan animo masyarakat terhadap lelang tetap dan bahkan dapat meningkat.

Berikut perbandingan target dan realisasi pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2019-2023.

Tabel 3.15. Pebandingan target dan realisasi IKU pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction tahun 2019 s.d. 2023

2019		2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
90%	98.50% 724 frek	90%	100% 753 frek	90%	98,89% 534 frek	92%	100% 791 frek	94%	99,80% 976 frek
Jumlah Frekuensi lelang 735x		Jumlah Frekuensi lelang 753x		Jumlah Frekuensi lelang 540x		Jumlah Frekuensi lelang 791x		Jumlah Frekuensi lelang 978x	

### c. Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction

Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi.

Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Pada tahun 2023, Capaian permohonan lelang online sebesar 99,80% dari target sebesar 86% dengan jumlah permohonan secara online sebesar 1.365 dan 2 permohonan tidak secara online.

## 7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Kemenkeu satu dapat dimaknai dengan semua pegawai Kementerian Keuangan merupakan satu keluarga, disiapkan ekosistem yang kolaboratif untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

#### a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU persentase pengembangan kompetensi ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Untuk tahun 2023 pegawai KPKNL Yogyakarta yang telah sesuai kriteria sebanyak 52 pegawai dari 52 pegawai yang memenuhi kriteria, artinya seluruh

pegawai KPKNL Yogyakarta telah memenuhi standar kompetensi teknis dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan IKU ini adalah dengan melakukan monitoring penyelesaian *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh serta keikutsertaan pegawai dalam webinar.

Action plan berikutnya antara lain akan mengikuti program pengembangan pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN dan terus melakukan monitoring pelaksanaan diklat tatap muka, *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh.

### 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	97,74	117,78%
2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	266,67%	266,67%

#### a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Adapun realisasi IKU ini 97,74 dari target sebesar 95.5 sehingga capaiannya sebesar 117,88%.

Belum optimalnya capaian IKU disebabkan oleh rumusan perhitungan SMART DJA yang memperhitungkan komponen efisiensi menjadikan posisi satker dilematis karena terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran dengan maksimal sehingga tidak dapat dilakukan efisiensi pada kegiatan tersebut.

Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi hasil review pengelolaan kinerja tahun 2021 s.d.2023.

Tabel 3.18. Perbandingan target dan realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2021-2023

2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
95,5	93,77	95,5	99,91	95,5	97,74

Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran antara lain dengan monitoring realisasi POK, koordinasi dengan UIC, berkoordinasi dengan satker GKN Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

*Action plan* berikutnya antara lain akan memastikan seluruh seksi di lingkup KPKNL Yogyakarta melakukan monitoring secara berkala dan akurat terhadap implementasi penggunaan anggaran serta mendorong setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

#### b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni:

### 1. Proses Pengajuan Sertipikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan serta melaksanakan update data tanah pada aplikasi SIMAN modul Master Aset. Target sertipikasi BMN berupa Tanah TA 2023, dibagi dalam empat kategori 1) *clean and clear* (kategori K1) 2) *not clean but clear* (kategori K2) 3) *clean but not clear & not clean and not clear* (kategori K3) 4) *Update & Validasi Data* terhadap tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga (kategori K4). Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengusulkan sertipikasi ke Kantor Pertanahan untuk Kategori K1, K2, dan K3 sedangkan *Update & Validasi Data* terhadap tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga untuk Kategori K4.

### 2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pemanfaatan BMN dengan Menggunakan Aplikasi BMN pada satker terlampir.

### 3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

#### a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

#### b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

#### c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing

dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Adapun realisasi IKU ini melampaui target sebesar 266,67% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 266,67%. Hal ini dapat dimaknai bahwa kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan pengadaan pada KPKNL Yogyakarta telah berjalan dengan baik.

## 9. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi 2 IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.19.

Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,22	120,28%
2	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	97,83	163,05%

#### a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Adapun realisasi IKU ini 96,22 dari target sebesar 80 sehingga capaiannya sebesar 120,28%.

#### b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

- Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
- Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
- Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
- Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
- Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
- Penyusunan Profil Pegawai,
- Penyusunan Simpulan dan LPPI,
- Jumlah Pengaduan Masyarakat,
- Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
- Kepuasan Stakeholders, dan

- Hasil Survei Penilaian Integritas.

Adapun realisasi IKU ini 96,83 dari target sebesar 60 sehingga capaiannya sebesar 163,05%.

## 10. Organisasi yang Fit for Purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi satu IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.20.

11. Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis organisasi yang *fit for purpose*

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK	100	100	100%

### a. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan.

Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satakernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Adapun realisasi IKU ini 100% dari target sebesar 100%, capaian ini merupakan hasil kerja keras segenap pegawai KPKNL Yogyakarta.

### KINERJA LAINNYA

Selain 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Arsip

Tahun 2023 ini, KPKNL Yogyakarta tetap melibatkan semua pegawai untuk berpartisipasi. Pencanangan “GEMATI” atau Gerakan Menata Arsip dengan Hati yang sudah dicanangkan sejak tahun 2022 menjadi awal pembenahan arsip pada KPKNL Yogyakarta. “GEMATI” merupakan kegiatan pemberkasan arsip yang dilakukan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pegawai KPKNL Yogyakarta. Kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode klasifikasi, pelabelan, pembuatan daftar arsip, dan penyimpanan.

#### 2. Optimalisasi BMN

Pada tahun 2023 KPKNL Yogyakarta selaku pengelola barang telah menerbitkan izin penggunaan sementara BMN. BMN berupa tanah dan Bangunan milik KPP Pratama Yogyakarta yang digunakan sementara oleh KPU Kota Yogyakarta dan BMN milik GKN Yogyakarta berupa tanah dan bangunan yang digunakan sementara oleh BNN Kota Yogyakarta.

#### 3. *Crash Program* Keringanan Utang

*Crash Program* Keringanan Utang merupakan program percepatan penyelesaian Piutang Negara dan/atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya atau beban lain.

*Crash Program* Keringanan Utang dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2023.

Melalui *crash program* keringanan utang ini KPKNL Yogyakarta berhasil menurunkan *outstanding* sebanyak 64 BKPN.

#### 4. Kehumasan

Kehumasan menjadi bagian penting bagi suatu organisasi sebagai upaya komunikasi publik dengan para pemangku layanan atas layanan yang diberikan. Sebagai instansi pemerintahan yang membutuhkan sarana/fasilitas untuk menyampaikan layanan-layanan sesuai tugas fungsi KPKNL Yogyakarta yang dapat digunakan oleh masyarakat, kehumasan menjadi jembatannya.

Bentuk kehumasan yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta, yaitu pengelolaan media sosial, penulisan berita liputan/artikel, penyusunan profil kantor, hubungan media massa, penyampaian informasi lewat iklan radio/surat kabar/situs internet, dan lainnya.

Berbagai bentuk kehumasan tersebut senantiasa dilaksanakan sebagai upaya menjaga citra baik dan reputasi KPKNL Yogyakarta dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat secara umum.

Dalam rangka mengenalkan tugas dan fungsi kepada masyarakat khususnya kepada dunia Pendidikan, KPKNL Yogyakarta Yogyakarta telah menggelar “DJKN Goes To Campus 2023” dengan mengundang civitas academia dari Fakultas Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

#### 5. Perbaikan Pelayanan

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju organisasi.

Transformasi digital lebih luas tidak hanya dari merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Menjawab kebutuhan tersebut, KPKNL Yogyakarta memiliki inovasi layanan di antaranya berupa *One Stop Service* yang merupakan aplikasi layanan lelang satu pintu yang dapat diakses oleh *stakeholder* dan Aplikasi PaiJo (Panggonan Idola Kerjo) merupakan aplikasi untuk menjaring preferensi unit kerja internal bagi pegawai KPKNL Yogyakarta.

**REALISASI ANGGARAN**

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per-31 Desember 2023 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp1.668.919.896,- atau 80,46% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.074.260.000,-. Realisasi per-jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.21 Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	Rp1.979.864.000	Rp1.575.092.196	79,56%
Belanja Modal	Rp94.396.000	Rp93.827.700	99,40%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp2.074.260.000</b>	<b>Rp1.668.919.896</b>	<b>80,46%</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Sebagai pengelola kekayaan negara, dan lelang, KPKNL Yogyakarta telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Hal ini tampak pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Yogyakarta tahun 2023 sebesar 115,72%.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan PNBP dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBP lelang dan PNBP pengurusan piutang
2. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta aman secara fisik, administrasi, dan hukum
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Satker.
4. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Melakukan inovasi dan mengembangkan lelang.
6. Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dengan mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam lingkup internal, Laporan Kinerja tersebut harus menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam lingkup eksternal, Laporan Kinerja menjadi media pengenalan kepada *stakeholders*

sehingga diharapkan peran KPKNL Yogyakarta dapat semakin dirasakan oleh masyarakat melalui pemberian layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta  
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (23.010.200.000)	134,20% (30.879.744.899)	134,20
		Persentase produktivitas lelang	80%	105%	131,25
		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (205.000.000.000)	156,09% (319.985.746.767)	156,09
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (3.000.000.000)	168,10% (5.042.996.827)	168,10
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100%	116,28
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	68%	84,30%	123,97
		Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100% (599)	120,37% (721)	120,37
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100% (156)	120,38 (214)	120,38
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	95,75	136,79
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% 48	125,36% 64	125,36
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,80%	106,17

		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	99,80%	116,04
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	1120
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	117,88%	117,9
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	266,67%	266,7
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,22	120,28
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	97,83	163,05
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK	100	100	100
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>115,72</b>

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp2.074.260.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp1.668.919.896,00

# **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**Gedung Keuangan Negara**

**Jalan Kusumanegara Nomor 11 Semaki, Kecamatan  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta**

**Telp : (0274) 544091**

**Wa : 08112958564**